

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Asikin, Z. (1993). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Z. (2007). *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Bruggink, j. H., & Sidarta, A. (1996). *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, A. R. (1995). *Hukum Perburuhan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Darwan, P. (2000). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Dimiyanti, K. (2004). *Metode Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dirdjosisworo, S. (1983). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- H, R. (1988). *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghali Indonesia.
- Harap, A. M. (2020). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Malang: Literasi Nusantara.
- Husni, L. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karim, F. (2001). *Mencari Konsep Upah Minimum Bagi Pekerja* (Vol. hlm. 7). Jakarta: Suara Merdeka.
- Kertonegoro, S. (1999). *Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja ( Bipartid) dan Pemerintah (Tripartid)*. Jakarta: YTKI.
- Kertonegoro, S. (1999). *Kebebasan Berserikat (Freedom of Association)*. Jakarta: YKTI.
- Khakim, A. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maimun. (2004). *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Manulang. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Manulang, S. H. (1995). *Pokok-Pokok Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, A. (1999). *Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prawira Hamidjojo, S. (1984). *Hukum Perikatan*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Radbruch, G., & Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Raharjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sapoetra, G. K., & Indraningsih, R. (1982). *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*. Bandung: Amirco.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Soemitra, R. H. (1998). *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimeri*. Jakarta: Ghalia.
- Soepomo, I. (1983). *Hukum Perburuhan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*. Bandung: Djambatan.
- \_\_\_\_\_, (1985). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan.
- subekti. (1987). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sulaiman, A., & Wali, A. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan Perburuhan*. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembang Sumber Daya Manusia.
- Sumakmur, P. K. (1987). *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: Haji Masagung.
- Tjiptoherijanto, P. (1999). *Keseimbangan Penduduk, Management Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Toha, H., & Pramono. (1987). *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*. Jakarta: Bina Aksara.

## **B. Jurnal**

- Umar Kasim, U. 2004. Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja, Informasi Hukum Vol. 2.
- HP Rajagukguk, 2000, Peran Serta Pekerja dalam Pengelolaan Perusahaan (Co-determination). Makalah.
- Asri Wijayanti, 2004, Kendali Alokasi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia, Yustika, Vol 7.
- Satjipto Rahardjo, penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat yang sedang berubah, Jurnal Masalah Hukum..

Niru Anita Sinaga dan Tiberius Saluchu, 2017, Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia, Jurnal Teknologi Industri, Vol.6.

Mochtar Halim, 2000 “Upah Layak Merupakan Tolak Ukur Keberhasilan Pertumbuhan Perekonomian”, Jurnal Tripartit Nasional.

Erlangga Yudha Prasetya, 2021 “Praktik Unpaid Internship Dalam Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia”. Jurnal Legislatif, Volume 4.

Ferry Irawan Febriansyah. 2016. Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Tulungagung : STAI-Muhammadiyah Tulungagung

### **C. Internet**

Dugaan Pelanggaran Jam Kerja di Perusahaan Garmen Ternama - Serikat Pekerja Nasional (spn.or.id) diakses 30 November 2022

Hukum Perusahaan Indonesia: Abdulkadir Muhammad - Belbuk.com diakses 4 Desember 2022

Prinsip dan Bentuk Perlindungan Tenaga Kerja (hukumonline.com) diakses 1 Desember 2022

<https://www.idntimes.com/business/economy/indianamalia/jadi-poin-krusial-uu-ciptaker-waktu-kerja-tetap-maksimal-8-jam-sehari#:~:text=Jakarta%2C%20IDN%20Times%20-%20Waktu%20kerja%20buruh%20dalam,antaranya%20Pasal%2077%20dan%2078%20tentang%20jam%20kerja>. diakses 27 November 2022

<https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/penjelasan-lengkap-aturan-jam-kerja-karyawan-terbaru-menurut-depnaker/#:~:text=Baik%20UU%20Ketenagakerjaan%20maupun%20UU%20Cipta%20Kerja%2C%20keduanya,kerja%20dengan%201%20hari%20Oistirahat%20dalam%201%20minggu>. Diakses 30 November 2022

repository.um-surabaya.ac.id/3118/1/1.\_buku\_hk\_ketenagakerjaan\_pasca\_reformasi.pdf

Emily, Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, dalam <https://Indonesianlegaldiscssion.wordpress.com>, diakses tanggal 29 Oktober 2022

### **D. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial ;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesain Perselisihan Hubungan Industrial;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan)
- Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 Pengesahan tentang ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning the Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa)